

ANALISIS INSTITUSI PENDIDIKAN DI DAERAH 3T
(Tugas Mata Kuliah Manajemen Publik)



Disusun oleh:

Nama : Mutia Sani

NPM : 2316041043

JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
2024

ANALISIS INSTITUSI SEKOLAH DI DAERAH 3T MENURUT PERSPEKTIF *RESOURCES ALLOCATION MODEL*

INTRODUCTION:

Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan yang pulaunya membentang dari timur ke barat. Berbagai macam jenis wilayah dapat ditemukan di Indonesia, salah satunya adalah daerah atau wilayah 3T. Daerah 3T adalah singkatan dari Daerah Tertinggal, Terdepan dan Terluar. Daerah 3T merupakan wilayah Indonesia yang memiliki kondisi geografis, sosial, ekonomi dan budaya yang kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional. Masyarakat di wilayah terpencil dan terluar atau di wilayah perbatasan tidak hanya diperhadapkan pada masalah ekonomi, melainkan juga pembangunan yang tidak merata. Hadirnya pembangunan yang tidak merata berimbas pada berbagai aspek, salah satu contohnya adalah pendidikan. Sistem pendidikan di wilayah ini, yakni wilayah terdepan, terpencil, dan tertinggal (3T) cukup memprihatinkan.

Pendidikan sendiri memiliki arti penting dalam mengembangkan diri tiap individu untuk dapat hidup dan melangsungkan kehidupan. Namun, karena pembangunan yang tidak merata mengakibatkan beberapa wilayah kurang mendapatkan sektor pendidikan yang layak. Pendidikan di daerah 3T (terdepan, terpencil, dan tertinggal) tentunya berbeda dengan pendidikan yang berada di daerah yang sudah maju, menurut survei kemendikbud yang telah dilakukan mengatakan bahwa pembelajaran di wilayah 3T masih terkendala. Dengan melihat pentingnya pendidikan, Pemerintah mengeluarkan peraturan yang secara khusus mengatur tentang kewajiban belajar bagi setiap Warga Negara yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar pasal 1 ayat (1) "Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah".

Harapan wajib belajar bagi setiap warga Negara sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Presiden tersebut diatas, juga tercantum dalam pembukaan Undang- Undang Dasar 1945 alinea pertama yang berbunyi "Mencerdaskan kehidupan Bangsa". Oleh karena itu menjadi kewajiban bagi

setiap warga Negara untuk menjalankan wajib belajar 12 Tahun dengan biaya yang gratis atau biaya sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah. Dalam membangun suatu Bangsa dan Negara, dibutuhkan SDM yang berkualitas dan mempunyai kemampuan untuk memberikan kontribusi terhadap bangsanya dan hal itu hanya bisa didapatkan setelah melalui proses Pendidikan.

Oleh karena itulah pendidikan dijadikan sebagai dasar dalam membangun Bangsa dan Negara. Melihat pentingnya pendidikan bagi setiap warga Negara, maka tidak jarang dari dunia pendidikan mengalami lika-liku pergumulan dalam menuntaskan dan merealisasikan UUD 1945 "Mencerdaskan kehidupan Bangsa". Permasalahan pendidikan di Indonesia dituai tiap tahunnya. Permasalahan pun muncul mulai dari aras input, proses, sampai output. Ketiga aras ini saling terkait satu sama lain. Input mempengaruhi keberlanjutan dalam proses pembelajaran. Proses pembelajaran pun turut mempengaruhi hasil output. Seterusnya, output akan kembali berlanjut ke input dalam jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi atau masuk ke dalam dunia kerja, dimana teori mulai dipraktekkan. Permasalahan pendidikan yang juga menjadi tantangan bagi kelanjutan pendidikan di daerah 3T ada pada ketiga hal diatas mulai dari input, proses, sampai output karena permasalahan putus sekolah.

ANALYSIS:

Institusi Sekolah di Daerah 3T

Institusi sekolah di daerah 3T terdiri dari sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), dan sekolah menengah atas (SMA) yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta. Keberadaan sekolah-sekolah ini sangat penting dalam membangun fondasi pendidikan dan keterampilan dasar bagi anak-anak di wilayah tersebut. Namun, Indonesia hingga saat ini masih mengalami kesenjangan dalam bidang pendidikan, hal tersebut ditandai dengan masih sulitnya akses layanan pendidikan khususnya di daerah-daerah 3T (Terdepan, Terluar dan Tertinggal). Masalah kesenjangan tersebut dimulai dengan persebaran pendidik yang tidak merata, infrastruktur yang kurang memadai dan kurang terjaminnya kesejahteraan pendidik. Selain masalah tersebut terdapat juga beberapa penyebab daerah disebut sebagai wilayah 3T terutama dalam

bidang pendidikan.

1. Faktor infrastruktur

Faktor ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan merupakan faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan penyelenggaraan pendidikan. Sarana dan prasarana yang memadai, seperti ruang kelas yang nyaman, laboratorium, perpustakaan, serta fasilitas olahraga, sangat penting dalam menunjang proses belajar mengajar yang efektif. Selain itu, akses menuju sekolah juga menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan. Jika akses menuju sekolah sulit, hal ini dapat menghambat berbagai upaya peningkatan kualitas pendidikan, termasuk penyaluran bantuan dari pemerintah daerah. Misalnya, kondisi jalan yang buruk atau lokasi sekolah yang terpencil dapat menyebabkan keterlambatan distribusi buku, alat peraga, dan sebagainya yang akan berdampak negatif pada proses pendidikan.

Oleh karena itu, perlu adanya perhatian khusus dari pihak terkait untuk memastikan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai serta akses yang mudah menuju sekolah. Hal ini termasuk perbaikan infrastruktur jalan dan transportasi, serta penyediaan fasilitas pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan. Dengan demikian, diharapkan semua siswa dapat menikmati pendidikan yang berkualitas tanpa hambatan akses maupun fasilitas.

2. Faktor kinerja dan kesejahteraan guru

Apabila dilihat dalam UU No. 14 Tahun 2005 mengenai hak dan kewajiban diantaranya bahwa hak guru dalam memperoleh penghasilan adalah di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial, mendapat promosi dan penghargaan, mendapatkan berbagai fasilitas untuk meningkatkan kompetensi. Namun, dalam praktiknya, seringkali kinerja dan kesejahteraan guru masih belum optimal. Beberapa faktor yang menyebabkan hal ini antara lain:

- a) Banyak guru, terutama yang bekerja di daerah terpencil, masih menerima gaji yang tidak memadai. Hal ini berdampak pada kesejahteraan mereka dan dapat menurunkan motivasi dalam bekerja.
- b) Tidak semua guru memiliki akses yang cukup terhadap program pelatihan dan pengembangan profesional. Hal ini bisa disebabkan oleh keterbatasan

anggaran, kurangnya informasi, atau kendala geografis.

- c) Guru sering kali merasa kurang diapresiasi atas kerja keras dan dedikasi mereka. Padahal, penghargaan dan pengakuan adalah faktor penting yang dapat meningkatkan semangat dan motivasi kerja

3. Faktor pembelajaran yang konvensional

Saat ini, masih banyak sekolah yang menjalankan pendidikan dengan berbagai keterbatasan yang ada karena dipengaruhi oleh ketersediaan dana, sarana prasarana, hingga guru yang kurang memiliki kemampuan mengembangkan model pembelajaran yang efektif dan menyenangkan. Dampak dari pembelajaran yang konvensional yaitu:

- a) Pembelajaran yang monoton dan kurang interaktif membuat siswa kurang tertarik dan termotivasi untuk belajar. Hal ini berdampak pada rendahnya partisipasi siswa dalam proses belajar mengajar.
- b) Pembelajaran konvensional sering kali tidak memberikan ruang bagi pengembangan keterampilan kritis, kreatif, kolaboratif, dan kemampuan berkomunikasi yang sangat dibutuhkan di abad ke-21.

4. Jumlah buku yang belum memadai

Seperti yang diketahui bahwa buku merupakan hal yang sangat penting dalam pendidikan, dengan adanya banyak buku membuat wawasan siswa akan semakin berkembang dan dapat menunjang keberhasilan suatu pendidikan. Semakin banyak buku yang tersedia di perpustakaan sekolah, semakin banyak sumber belajar yang dapat diakses oleh siswa. Hal ini memungkinkan siswa untuk melakukan eksplorasi dan penelitian mandiri, sehingga meningkatkan keterampilan belajarnya.

5. Anggaran yang dimiliki masih terbatas

Pendanaan pendidikan merupakan hal yang penting dalam memastikan keberlangsungan dan kualitas pendidikan di suatu negara. Dalam makalah ini, kita akan membahas tentang berbagai aspek pendanaan pendidikan, termasuk peran pemerintah dan swasta dalam membiayai pendidikan, sumber pendanaan pendidikan, dan tantangan yang dihadapi dalam mengelola dana

pendidikan. Pendidikan merupakan sebuah investasi jangka panjang bagi negara. Dengan pendidikan yang berkualitas, suatu negara dapat memperbaiki kualitas sumber daya manusianya, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Pelayanan Institusi Sekolah di Daerah 3T

Untuk mengatasi berbagai hal yang menyebabkan pendidikan di wilayah 3T kurang, maka pemerintah telah mengupayakan berbagai pelayanan terkait cara meningkatkan kualitas pendidikan di daerah 3T, antara lain:

1. Pengembangan Infrastruktur Sekolah

Upaya pembangunan dan renovasi sekolah dilakukan untuk menyediakan fasilitas yang lebih baik. Program ini mencakup pembangunan ruang kelas baru, penyediaan perpustakaan, laboratorium, dan akses internet. Pembangunan ruang kelas baru meningkatkan kapasitas sekolah untuk menampung lebih banyak siswa sehingga proses pembelajaran efektif. Penyediaan perpustakaan yang lengkap dan nyaman memberikan akses kepada siswa untuk memperluas pengetahuan mereka. Fasilitas laboratorium yang baik memungkinkan siswa untuk melakukan eksperimen dan praktikum secara langsung. Akses internet di sekolah memungkinkan siswa dan guru untuk mengakses sumber daya pendidikan online secara cepat.

2. Peningkatan Kualitas Tenaga Pendidik

Program pengiriman guru ke daerah 3T seperti Program Sarjana Mendidik di Daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (SM3T) bertujuan untuk mengatasi kekurangan tenaga pendidik. Perlu adanya kolaborasi dari berbagai pihak untuk menjamin adanya guru yang berkualitas, sehingga mampu menciptakan output lulusan yang diharapkan. Sistem pendidikan di Indonesia menghasilkan generasi muda yang siap untuk menatap masa depan yang baik. Hal tersebut memerlukan guru yang berkualitas dalam penerapan berbagai kebijakan yang ada.

3. Program Beasiswa

Untuk mendorong anak-anak di daerah 3T tetap bersekolah, pemerintah menyediakan berbagai program beasiswa. Beasiswa ini membantu meringankan beban biaya pendidikan bagi keluarga yang kurang

mampu. Program beasiswa yang meliputi sekolah dasar hingga jenjang kuliah juga dapat membantu mengurangi beban finansial bagi keluarga yang kurang mampu. Dalam jangka panjang, Program beasiswa memiliki potensi untuk meningkatkan mutu pendidikan dan mengurangi disparitas sosial di Indonesia. Salah satu bentuk beasiswa yang memiliki dampak yang sangat besar yaitu program beasiswa kartu Indonesia pinta kuliah (KIP K).

4. Kerja Sama dengan Lembaga Non-Pemerintah

Pemerintah sering kali bekerja sama dengan lembaga swasta dan organisasi non-pemerintah untuk memberikan layanan pendidikan tambahan seperti pelatihan vokasional, program mentoring, dan kegiatan ekstrakurikuler.

Selain pemerintah, berbagai upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan di daerah 3T juga dapat dilakukan oleh pihak lembaga pemerintah dan peran masyarakat, yakni sebagai berikut:

1. Peran lembaga pendidikan

- a) Menerapkan model pembelajaran yang dikondisikan dengan keadaan lokal
- b) Menerapkan konsep asimilasi dalam pembelajaran, yakni siswa mencoba hal baru berdasar pada pengetahuan yang telah dimilikinya
- c) Menerapkan konsep akomodasi dalam pembelajaran, yakni siswa memperluas pengetahuan melalui pengalaman-pengalaman mereka
- d) Guru harus memberikan dukungan melalui kerjasama antarguru, dan kerjasama guru-orang tua-masyarakat
- e) Guru perlu berkreasi dan berinovasi dalam mengembangkan pelajaran
- f) Guru perlu mumpuni dalam penggunaan teknologi

2. Peran masyarakat

- a) Mengawasi perkembangan dan proses pembelajaran anak di rumah
- b) Menyediakan fasilitas pembelajaran yang dibutuhkan anak
- c) Memberikan feedback kepada sekolah mengenai pelaksanaan pendidikan
- d) Memberikan usul dan saran untuk perbaikan pendidikan di sekolah

Resources Allocation Model dalam Konteks Pendidikan di Daerah 3T

Teori *Resources Allocation Model* menyediakan kerangka kerja yang

efektif untuk mengelola sumber daya dalam konteks yang terbatas, seperti yang dihadapi oleh institusi pendidikan di daerah 3T. Dimana metode ini adalah pengalokasian sumber daya agar dapat meminimalisasi fluktuasi penggunaan sumber daya perhari selama proyek berlangsung. Sehingga dapat menghemat waktu pengerjaan dan di dapatkan pembagian sumber daya yang baik dan efisien. Kelebihan *resource allocation* adalah memberikan dampak positif kepada pihak kontraktor dalam penyediaan sumber daya untuk pemerataan sumber daya selama proses pelaksanaan konstruksi. Serta menghindari kemungkinan buruk yang akan terjadi terhadap aktivitas yang mengakibatkan fluktuasi yang tajam.

Pendekatan ini melibatkan empat langkah utama: identifikasi kebutuhan, penetapan prioritas, distribusi sumber daya, serta monitoring dan evaluasi.

1. Identifikasi Kebutuhan

Langkah pertama adalah mengidentifikasi kebutuhan spesifik dari sekolah-sekolah di daerah 3T. Hal ini mencakup penilaian kondisi fisik sekolah, jumlah dan kualitas tenaga pendidik, serta akses terhadap sumber belajar. Data yang akurat dan komprehensif sangat penting dalam tahap ini untuk memahami situasi dan kebutuhan sebenarnya. Dengan melakukan penilaian menyeluruh terhadap kondisi fisik sekolah, termasuk bangunan, fasilitas, dan infrastruktur pendukung lainnya. Hal ini akan membantu memahami apakah ada kebutuhan untuk renovasi, perbaikan, atau pembangunan baru. Kemudian, informasi mengenai jumlah dan kualitas tenaga pendidik akan membantu dalam menentukan apakah diperlukan penambahan atau peningkatan kualitas bagi para tenaga pendidik. Akses terhadap sumber belajar juga bertujuan untuk memastikan bahwa siswa memiliki akses yang memadai terhadap materi pembelajaran yang diperlukan.

2. Penetapan Prioritas

Setelah kebutuhan diidentifikasi, prioritas harus ditetapkan berdasarkan urgensi dan dampak potensial dari intervensi yang dilakukan. Misalnya, memperbaiki kondisi fisik sekolah yang sangat rusak mungkin menjadi prioritas utama dibandingkan dengan proyek jangka panjang seperti pembangunan laboratorium baru.

3. Distribusi Sumber Daya

Sumber daya yang tersedia harus dialokasikan sesuai dengan prioritas yang telah ditetapkan. Distribusi ini harus dilakukan secara adil dan efisien untuk memastikan bahwa setiap sekolah menerima dukungan yang sesuai dengan kebutuhannya. Kerjasama antar lembaga pemerintah, swasta, dan komunitas lokal sangat penting dalam tahap ini. Kerjasama antara lembaga pemerintah, swasta, dan komunitas lokal dalam mendukung proyek-proyek pembangunan pendidikan dapat meliputi penyaluran dana, penyediaan sumber daya manusia, atau kontribusi dalam bentuk fasilitas dan infrastruktur.

4. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan diperlukan untuk menilai efektivitas alokasi sumber daya dan memastikan bahwa tujuan dari pendidikan tercapai. Evaluasi ini juga membantu mengidentifikasi area yang memerlukan penyesuaian atau perbaikan lebih lanjut. Dengan melakukan monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan, kita dapat memastikan bahwa sumber daya dialokasikan dengan efektif, tujuan pendidikan tercapai, dan perbaikan yang diperlukan dapat dilakukan secara tepat waktu. Ini akan membantu meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi siswa, sekolah, dan masyarakat.

CONCLUSION:

Pendidikan di daerah terdepan, terpencil, dan tertinggal (3T) merupakan tantangan yang signifikan bagi Indonesia. Meskipun peraturan dan prakarsa pemerintah telah diimplementasikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di wilayah-wilayah ini, masih terdapat berbagai kendala yang perlu diatasi. Faktor-faktor seperti infrastruktur yang kurang memadai, kesejahteraan guru yang belum optimal, pembelajaran yang konvensional, ketersediaan buku yang terbatas, serta anggaran yang terbatas menjadi hambatan utama dalam meningkatkan pendidikan di daerah 3T. Upaya pembangunan infrastruktur sekolah, peningkatan kualitas tenaga pendidik, program beasiswa, dan kerja sama dengan lembaga non-pemerintah menjadi langkah-langkah yang penting

dalam meningkatkan pelayanan pendidikan di daerah 3T.

Untuk mengelola sumber daya dalam konteks terbatasnya sumber daya di daerah 3T, diperlukan pendekatan yang efektif. Melalui pendekatan Resources Allocation Model, langkah-langkah seperti identifikasi kebutuhan, penetapan prioritas, distribusi sumber daya, serta monitoring dan evaluasi dapat dilakukan secara sistematis untuk memastikan penggunaan sumber daya yang optimal dalam mendukung pendidikan di daerah 3T. Dengan demikian, dengan upaya bersama dari pemerintah, lembaga pendidikan, masyarakat, dan berbagai pihak terkait lainnya, diharapkan pendidikan di daerah 3T dapat terus meningkat dan memberikan kesempatan yang sama bagi setiap anak untuk mendapatkan pendidikan berkualitas, sesuai dengan semangat "Mencerdaskan kehidupan Bangsa" sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, S. 2020. *Perluasan dan Pemerataan Akses Pendidikan Daerah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal)*. Penerbit Laksita Indonesia. Serang.
- Albugis, I.S., Dundu, A., dan Pratasis, A.K. 2020. Penerapan Resource Allocation Pada Pembangunan Shelter Pengungsi di Kabupaten Sitaro. *Jurnal Sipil Statik*, 8 (3): 453 – 462.
- Amadi, A.S.M., Hasan, S., Rifanto, N.A., Wildan, M., Afifah, N.Q., dan Nisak, N.M. 2023. Upaya Pemerintah dalam Menjamin Hak Pendidikan untuk Seluruh Masyarakat di Indonesia. *Jurnal Pendidikan*, 18 (1): 161 – 171.
- Ambarita, J., dan Yuniati, E. 2020. *PAK dan Covid-19 Problematika Pembelajaran PAK Daerah Tertinggal*. Penerbit Adab. Jawa Barat.
- Hardiasanti, M. dan Trihantoro, S. 2021. Implementasi Wajib Belajar di Daerah Terdepan, Terluar dan Tertinggal. *Jurnal Inspirasi Manajemen Pendidikan*, 9 (5): 1064 – 1077.
- Masing, M., dan Astuti, K. 2021. Putus sekolah sebagai Tantangan Pendidikan Daerah 3T (Tertinggal, Terluar dan Terdepan). *Jurnal Prosiding Semhas*, 1 (1): 140 – 148.
- Pribudhiana, R., Bin Don, Y., dan Bin Yusof, M. R. 2021. Determining the influence of teacher quality toward teacher readiness in implementing Indonesian education policy. *Eurasian Journal of Educational Research*, 8 (1): 373 – 390.
- Rahmadhani, H. 2021. *Penerapan Resource Allocation Pada Pembangunan Shelter Pengungsi di Kabupaten Sitaro*. Penerbit CV Budi Utama. Yogyakarta.
- Rira, P. dan Sinding, R.R. 2023. Revitalisasi Mutu Pendidikan di Wilayah 3T. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 1 (2): 354 – 363.
- Saputro, A. N. C., Kuswandi, S., dan Pu, S. 2022. *Manajemen Mutu Terpadu Untuk Pendidikan*. Yayasan Kita Menulis. Medan.
- Sutansyah, L. dan Ramdani, A. 2023. Pembiayaan Pendidikan: Urgensi, Tantangan, dan Solusi. *Jurnal Pelita Nusantara: Kajian Ilmu Sosial Multidisiplin*, 1 (2): 221 – 226.
- Syarifuddin, M. A., Mardianto, A., dan Maknun, J. 2021. *Pendidikan Bagi Anak di Daerah 3T (1 ed.)*. Direktorat Sekolah Dasar – Kemendikbudristek. Jakarta.